

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 212 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 183 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA  
SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. sehubungan dengan adanya pembaruan daftar nama Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara, perlu penyempurnaan terhadap daftar nama Keanggotaan Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara;

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 183 Tahun 2022 tentang Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 183 TAHUN 2022 TENTANG TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 183 Tahun 2022 tentang Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH  
 NOMOR 183 TAHUN 2022 TENTANG  
 TIM PEMBAHASAN ANTAR  
 KEMENTERIAN RANCANGAN  
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH TENTANG TATA CARA  
 PENGADAAN BADAN USAHA KERJA  
 SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN  
 USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR : 212 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA SAMA  
 PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA**

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Sarah Sadiqa	-
2	Ketua	:	Raden Ari Widiyanto	-
3	Anggota	:	1. Tatang Rustandar Wiraadmadja 2. Zulhenny 3. Dwi Satrianto 4. Rusli Maryadi	- - - -

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		5. Rinaldi Morintoh	-
		6. Fajar Adi Hermawan	-
		7. Thanthawi Jauhari	-
		8. Firmansyah	-
		9. Febri Kamalisa Rachman	-
		10. Rasmita Juliana Sitepu	-
		11. Tino Yuka Aldilla	-
		12. Oktrita Purwanti Rahayu	-
		13. Mario Duwi Cahyo	-
		14. Rizki Arif Sudrajat	-
		15. Frama Nugraha	-
		16. Lingga Sakti	-
		17. Ardian Hoppin Sitompul	-
		18. Cherish Shery Desarya	-
		19. Djoko Wibowo - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	500.000
		20. Hendra Agung Permana - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	500.000
		21. M. Zulfikar Ali - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia	500.000
		22. Biromo Nayarko - Kementerian Sekretariat Negara	500.000
		23. Agus Hariadi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	500.000
		24. Ary Rahman Wahyudi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		25. Prayoga Nugraha - Kementerian Perhubungan	500.000
		26. Ackhmad Afflazir - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	500.000
		27. Devi Laksmi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI